



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

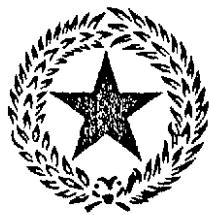
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Jaksa Agung;  
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;  
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
9. Kepala Badan Pusat Statistik;  
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;  
11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;  
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;  
13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;  
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;  
15. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola; daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;
3. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan	13 SPM	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Kemendagri
		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah	5 SPM	Desember 2010		Kemendagri Semua daerah
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pemberian NIK kepada setiap penduduk	Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk	329 kab/kota	Desember 2010	Tercapainya pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan dalam 3 tahun	Kemendagri Kab/kota terkait
	Pemberian e-KTP berbasis NIK	Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK	4,2jt jiwa di 6 kab/kota	Desember 2010		
Pemantapan pengadaan barang dan jasa	Penguatan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 RUU	Desember 2010	Terwujudnya peningkatan efisiensi belanja negara	LKPP
		Terlaksananya sosialisasi Perpres penganti Keppres 80/2003 bagi seluruh instansi pusat dan daerah	100%	Desember 2010		LKPP Semua K/L dan daerah
	Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP	100 LPSE	Desember 2010		LKPP K/L dan daerah terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Penguatan metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	100% Desember 2010	Terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Kemendiknas	Daerah terkait
Penguatan pengelolaan sekolah	Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase kepala TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15% Desember 2010	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan unggul	Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10% Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15% Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10% Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15% Desember 2010		Keunendiknas	Kab/Kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Penguatan pendidikan agama	Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama	Percentase guru agama Islam yang mengikuti pelatihan kompetensi	10%	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pendidikan agama	Kemenag
		Jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	5,000	Desember 2010		Kemenag
		Jumlah santri yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	1,000			Kemenag
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	500			Kemenag
		Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan	Penyusunan Standar	Desember 2010		Kemenag
Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan	Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu	10.000	Desember 2010	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan	Kemendiknas
		Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional	8	Desember 2010		Kemendiknas
		Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	95	Desember 2010		Kemendiknas
	Penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah	Percentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	40%	Desember 2010		Kemendiknas
		Percentase satuan pendidikan jenjang SMP menerapkan pembelajaran berbasis TIK	20%	Desember 2010		Kemendiknas
	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan)	Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	50 sekolah	Desember 2010		Kemenkominfo
						Pemda DIY



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
		Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase)	9 kab/kota sistem air limbah <i>off-site</i> , 10 kab/kota penanganan drainase	Desember 2010		Kemen PU
Pengawasan obat dan makanan	Penguatan upaya pengawasan obat dan makanan	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa di 31 balaikota/Balai POM	15,000	Desember 2010	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Badan POM
Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Penataan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Tersusunnya/disahkan perangkat hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi: (1) Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) PP Penerima Bantuan Iuran (PBI); (3) Perpres Jaminan Kesehatan	100%	Desember 2010	Berkembangnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Kemenko Kesra
Penyediaan obat esensial nasional	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan	Percentase ketersediaan obat dan vaksin	80	Desember 2010	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan	Kemenkes
Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan (Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secara merata	Tersusunnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai masa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruan tinggi dan spesialisasi terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	100%	Desember 2010	Tersedianya 1200 tenaga kesehatan di Puskesmas Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Rumah Sakit	Kemenkes
		Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	1200	Desember 2010		kab/kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KEUJARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah	Percentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	Desember 2010	Menurunnya angka kemiskinan	Kemenkes
		Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8,481	Desember 2010		Kemenkes
		Percentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	Desember 2010		Kemenkes
	Peningkatan intensitas pelayanan KB bagi masyarakat berpendapatan rendah	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	3,75 juta orang	Desember 2010	BKKBN	Daerah terkait
		2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	11,9 juta orang	Desember 2010		
	Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2,767,300	Desember 2010	Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966,100	Desember 2010		
		Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378,800	Desember 2010		
		Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305,550	Desember 2010		
		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65,000	Desember 2010		
		Jumlah siswa MI miskin penerima beasiswa	750,000	Desember 2010		
		Jumlah siswa MTs miskin penerima beasiswa	600,000	Desember 2010		
		Jumlah siswa MA miskin penerima beasiswa	400,000	Desember 2010		
		Bantuan Beasiswa Bakat dan prestasi siswa MTs	1,000	Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	PRASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat dan anak serta pelayanan sosial bagi lansia	Jumlah penyandang cacat yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	34,900	Desember 2010	Kemensos	Daerah terkait
		Jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	159,500	Desember 2010		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	22,040	Desember 2010		
	Penyusunan rencana integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM	Konsep rencana integrasi PNPM Inti dan Penguatan	100%	Desember 2010	Meningkatnya efektifitas PNPM Mandiri	Tim Pengendali PNPM Mandiri
	Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500 kel, 884 kcc di 246 kota	Desember 2010		Kemen PU
		Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM	4791 kec	Desember 2010		Kemendagri
		Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias dan Nias Selatan	2 kab/9 kec.	Desember 2010		Kemen PU
		Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	237	Desember 2010		Kab Nias/Nias Selatan
	Peningkatan integrasi PNPM Penguatan	Jumlah kabupaten daerah tertinggal	51 kabupaten	Desember 2010		Daerah terkait
		Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30 kab/kota	Desember 2010		KPDT
		Jumlah desa yang terfasilitasi air minum dan penyehatana lingkungan berbasis masyarakat	1.472 desa	Desember 2010		Kemen PU



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
	Peningkatan kualitas <i>targeting</i> dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Evaluasi dan analisa efektifitas sistem targeting  Penyusunan SOP untuk <i>targeting</i> <i>Draft design</i> pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011	0.75  Desember 2010  Desember 2010  Desember 2010	Penyempurnaan pendataan RTS	Timnas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk	245 SKPD	Desember 2010	Kementan	Daerah terkait
		Jumlah kelembagaan petani (Gapoktan)	2.830 kelompok	Desember 2010		
		Jumlah BPP model	336 BPP	Desember 2010		
		Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang)	27.393 org	Desember 2010		
		Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian	30%	Desember 2010		
	Peningkatan produksi ternak ruminansia	Pengembangan sapi bibit potong	21.000 ekor	Desember 2010	Kementan	Daerah terkait
		Pengembangan bibit sapi perah	1.250 ekor	Desember 2010		
		Pengembangan integrasi tanaman ternak	75 unit	Desember 2010		
	Penyediaan kapal nelayan di berbagai daerah	Mekanisme pelaksanaan dan monev pemberian kapal nelayan dan jumlah kapal yang diberikan kepada nelayan	60 unit	Desember 2010	Kemen KP	Daerah terkait
	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178,18	Desember 2010	Kementan	
Penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11,06	Desember 2010	Kementan		
	Uji coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani	Finalisasi kajian uji coba subsidi langsung	1 paket	Juni 2010	Kementan	
		Rancangan bangun subsidi pupuk langsung ke petani	1 paket	Desember 2010		
		Pilot project subsidi pupuk langsung ke petani	1 kabupaten	Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemenuhan konsumsi pangan dan kualitas gizi masyarakat	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.	1.750 desa	Desember 2010	Meningkatnya ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat	Kementerian
		Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan.	800 lumbung	Desember 2010		Kab/kota terkait
		Penanganan daerah rawan pangan.	350 kab	Desember 2010		Kab/kota terkait
		Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	33 prop	Desember 2010		Kab terkait
		Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan.	33 prop	Desember 2010		Seluruh provinsi
	Percepatan pengenakan ragaman konsumsi pangan	Terbinaanya kelompok wanita dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang	2000 desa	Desember 2010		Daerah terkait
		Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan non beras dan terigu	2000 kelompok	Desember 2010		Daerah terkait
		Sosialisasi dan promosi pengenakan ragaman konsumsi pangan	200 kabupaten	Desember 2010		Kab terkait
		Berkembangnya teknologi pengolahan pangan lokal	33 provinsi	Desember 2010		Seluruh provinsi
	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	750 kelompok	Desember 2010	Kementerian	Daerah terkait
		Data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.	33 prop	Desember 2010		Seluruh provinsi
		Laporan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.	33 prop	Desember 2010		Seluruh provinsi
Peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan	Pembangunan gudang-gudang pangan dan penyediaan peralatannya serta fasilitasi efektivitas pemanfaatannya	Tersusunnya <i>masterplan</i> pengembangan gudang-gudang pangan	1 paket	April 2010	Meningkatnya efisiensi distribusi dan logistik	Kemendag
		Tersedianya gudang-gudang pangan sesuai SK Mendag (jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) di sentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota	12 gudang komoditi	6 bulan (Mei-November 2010)		Kemendag



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
	Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah	Sertifikasi tanah	495.620 bidang tanah (Prona sebanyak 139.620 bidang, UKM 30.000 bidang, Pertanian 23.000 bidang, DKP 30.000 bidang, Transmigrasi 30.000 bidang)	Desember 2010		BPN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Peningkatan <i>domestic connectivity</i>	Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT serta pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional	Panjang penyelesaian jalan lintas yang mendapat peningkatan kapasitas, yang terdiri dari :  - Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) - Panjang jalan lingkar/bypass yang dibangun - Panjang jembatan yang dibangun  - Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun - Panjang <i>flyover/underpass</i> yang dibangun Terbentuknya unit pengelola dana preservasi jaringan jalan Panjang jalan yang dipreservasi Panjang jembatan yang dipreservasi	1.579,79 km  1.368,72 km 18,4 km 4.921 m  184 km 491 m 3.262 m 100% 32.349 km 9.235,7 m	Desember 2010  Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Juli 2010 Desember 2010 Desember 2010	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa  Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU  Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU	Dacra terkait
	Penyusunan Sistem Transportasi Nasional dan cetak biru transportasi multi moda	Studi tinjau ulang arah kebijakan Sistranas dan Tatranas Studi implementasi cetak biru transportasi antar moda/ multi moda  <i>Masterplan</i> Integrasi Sistem Tiket Elektronik Transportasi untuk wilayah Jabodetabek sesuai cetak biru Transportasi Perkotaan di 4 kota besar	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pengendalian banjir	Penyelesaian Kanal Banjir Timur	Terselesaikannya pembangunan KBT konstruksi utama paket 22 - 29	100%	Desember 2010	Mengurangi potensi banjir pada daerah rawan banjir	Kemenkeu (BA. 999) Pemprov DKI Jakarta
	Pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo	Terselesaikannya Waduk Gonggang	100%	Desember 2010		Kemen PU Pemprov Jateng
		Tersedianya prasarana pengendalian banjir (pompa air di 1 lokasi 2 unit pompa)	100%	Desember 2010		Kemen PU
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Penyusunan <i>ICT Fund</i> untuk membiayai pembangunan jaringan <i>backbone</i> serat optik	Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan <i>ICT Fund</i> dan optimisasi PNBP untuk pembiayaan jaringan <i>backbone</i> serat optik	100%	Desember 2010	Meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan informasi dan komunikasi	Kemenkominfo
Peningkatan Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Kajian sistem penyediaan dana pembebasan tanah baik berupa dana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secara finansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yang kurang layak secara finansial	100%	Agustus 2010	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	BPN
		Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit penyedia dana talangan untuk pembebasan tanah di masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek KPS atau di satu Kementerian/Lembaga	100%	November 2010		Kemenkeu
		Unit dan mata anggaran (APBN) penyediaan dana dukungan fiskal untuk pembebasan tanah	100%	Okttober 2010		Kemenkeu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

**PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010**

**PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyederhanaan prosedur investasi dan usaha	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SP, IP, ISE) pada PTSP	Jumlah perizinan dan non perizinan sektor yang dilayani SPIPISE (setelah dilakukan penyederhanaan tata cara permohonan)	3 sektor	Desember 2010	Menurunkan hambatan investasi	BKPM
		Jumlah PTSP provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SPIPISE	33 provinsi dan 40 kabupaten/kota	Desember 2010		
		Jumlah instansi yang terintegrasi dengan SPIPISE	16 instansi	Desember 2010		
		Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP	130 PTSP	Desember 2010		
	Rekomendasi pembatalan Perda bermasalah terkait investasi dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal	1	Desember 2010		Seluruh Provinsi; Kab/Kota terkait
		Jumlah Perda yang dikaji dan diusulkan untuk dibatalkan	1 paket	Desember 2010		
		Jumlah perizinan dan nonperizinan sektor untuk memulai usaha yang diusulkan untuk diturunkan/dihapuskan biayanya	1 paket	Desember 2010	Kemendagri	Daerah terkait
					Kemendag	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

## **PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
	Pengelolaan fasilitasi ekspor-impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (peraturan)	4	Desember 2010	Kemendag	
		Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE (perusahaan)	1,500	Desember 2010		
	Perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai	Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC	100%	Desember 2010	Kemenkeu	
		Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW	-	Desember 2010		
		PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	Desember 2010		
		PMK tentang <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	Desember 2010		
		PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik	-	Desember 2010		
	Pelaksanaan <i>National Single Window</i> di sektor perhubungan	Jaringan <i>System National Single Window</i> di kantor pusat	1 paket	Desember 2010	Kemenhub	
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha	Penyeimpurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	Tersusunnya rancangan peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT dan <i>outsourcing</i> ), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah akademis	Desember 2010	Meningkatnya kepastian berusaha	Kemenakertrans
		Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		Desember 2010		Kemenakertrans
		Selarasnya peraturan bidang III	Inventarisasi Perda III	Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KEJUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
		Mekanisme perundungan secara <i>bipartit</i> , pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	Desember 2010		Kemenakertrans
Pengembangan perdagangan dalam negeri	Penguatan monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP	Terlaksananya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi PERDA yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP	100 kab/kota	Desember 2010	Meningkatnya perdagangan dalam negeri	Kemendag
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Penyusunan peraturan perundungan bagi pengembangan (KEK)	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus pelaksanaan UU No 39/2009	1	Desember 2010	Ditetapkannya 1 KEK	Kemenko Perekonomian
		Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	Desember 2010		Kemendag
		Tersedianya PMK-PMK tig pemberian fasilitas fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema pembiayaan infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	Desember 2010		Kemenkeu
	Pengembangan kelembagaan KEK	Pembentukan Dewan Nasional KEK	1 paket	Desember 2010		Kemenko Perekonomian
		Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	6 daerah dan 4 negara	Desember 2010		BKPM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

PRIORITAS 8 : ENERGI

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	KASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Ketahanan energi	Peningkatan pasokan listrik	Pembangkit, jaringan dan gardu transmisi :		Meningkatnya penyediaan listrik		
		- Kapasitas pembangkit MW), transmisi (Kms) dan gardu induk (MVA)	22 MW, 3381 Kms, 2159 MVA		Kemen ESDM	
		Jaringan dan gardu distribusi :			Kemen ESDM	
		- Gardu dan jaringan (Kms/MVA)	18.004 dan 1.266		Kemen ESDM	
	Pengembangan Geothermal	Penambahan kapasitas PLTP (MW)	70		Kemen ESDM	
		Revisi PP No.68/1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KSA)	1 judul		Kemenhut	
	Pengembangan energi alternatif diluar panas bumi	Lisdes (EBT) :			Kemen ESDM-DAK	
		- PLTS 50 Wp tersebar (MW)	3.55		Kemen ESDM-DAK	
		- PLTMH (MW)	1.53		Kemen ESDM	
		- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)	1		Kemen ESDM	
		DME	50 lokasi		Kemen ESDM Kemenristek/BATAN	
		Terlaksananya sosialisasi pengembangan energi nuklir untuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuh				
	Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan dan rumah tangga	FEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di 3 kota	3 kota		Kemen ESDM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pengelolaan hutan	Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	239.000 ha	Desember 2010	Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan emisi karbon	Kemenhut
		Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 ha	Desember 2010		
		Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 ha	Desember 2010		
		Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 ha	Desember 2010		
		Fasilitasi rehabilitasi kawasan konservasi/lindung	100.000 ha	Desember 2010		
	Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	400.000 ha	Desember 2010	Kemenhut	Daerah terkait 30 kab terkait
		Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 klpk	Desember 2010		
		Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha	50.000 ha	Desember 2010		
		Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	Desember 2010		
		Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Peningkatan pengelolaan DAS serta pengelolaan hutan dan lahan gambut	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	22 DAS	Desember 2010	Menurunnya kerawanan bencana di DAS dan lahan gambut	
		Terbangunnya <i>baseline</i> data pengelolaan DAS di 36 BPDAS	7 BPDAS	Desember 2010		
		Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	7 BPDAS	Desember 2010		
	Pengelolaan kualitas air dan kawasan gambut	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	25%	Desember 2010		KLH
		Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait	20%	Desember 2010		
Penurunan beban pencemaran lingkungan	Pengendalian pencemaran air dan udara	Menurunnya beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketat pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 690 kegiatan industri dan jasa	680	Desember 2010	Penurunan pencemaran lingkungan dan emisi karbon	KLH
	Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim sampai ke tingkat regional	Tersusunnya daftar kriteria baku kerusakan LI akibat perubahan iklim		Desember 2010		
Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menerapkan <i>sanitary land fill</i> dan mengoptimalkan program 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )	Berkurangnya volume sampah melalui 3 R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan	26 kota besar dan metropolitan	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	KLH
		Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan (TPA Regional)	6 TPA Regional melayani 17 kab/kota	Desember 2010		
					Kemen PU	Kab/kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dilaksanakan	27	Desember 2010	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	KPDT
	Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika	Prosentase desa yang dilayani akses internet (dengan prioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan di wilayah <i>Universal Service Obligation</i> , sejumlah 4.218 desa)	5%	Desember 2010	Kemenkominfo	Daerah terkait
		Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>National Internet Exchange (4 kota)</i>	10%	Desember 2010	Kemenkominfo	Kota terkait
		Jumlah Desa Informatif termasuk ketersediaan radio komunitas	15 desa	Desember 2010	Kemenkominfo	Daerah terkait
	Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan khusus	46.300 orang	Desember 2010	Kemendiknas	
		Jumlah guru madrasah penerima tunjangan khusus	5.000 orang	Desember 2010	Kemenag	
	Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pembangunan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi lintas sektor	20%	Desember 2010	KPDT	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG AWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
		Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22			
		Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60			
		Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3			
		Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3			
	Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau kecil terluar	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	Desember 2010	Kemen KP	Daerah terkait
		Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	KASARAN (5)	INSTANSI PEMANGGUJUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pemantapan reintegration Aceh	Penyusunan peraturan perundangan untuk memperkuat reintegration Aceh	Terbitnya 3 PP dan 2 Perpres tindak lanjut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh	100% Desember 2010	Mantapnya pelaksanaan reintegration Aceh	Kemendagri	Pemprov NAD
Pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme	Pemantapan penanggulangan tindak terorisme	Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi, dan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme	12 kali Desember 2010	Terwujudnya NKRI yang lebih kokoh dan menurunnya tindak terorisme	Kemenko Polhukam	
		Terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnya Rencana Induk Program Deradikalisasi	100% Juni 2010		Kemenko Polhukam	
		Jumlah pengungkapan perkara tindak pidana terorisme dan <i>Clearance Rate</i> tindak pidana terorisme tingkat nasional	100% Desember 2010		POLRI	
	Penyusunan RUU Keamanan Nasional	Draft RUU Keamanan Nasional	100% Desember 2010		Kemenhan	
	Penyerahan tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan	Perpres tentang tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan	100% Desember 2010		Kemenhan	
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi	Jumlah penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	145 pkr Desember 2010	Menurunnya tindak pidana korupsi	Kejagung	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pengembangan industri nasional	Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, <i>oleochemical</i>	<i>Business Plan</i> Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit	1 paket	Desember 2010	Menguatnya struktur dan berkembang daya saing industri nasional	Kemenperin
		Penyelesaian AMDAII, FS dan <i>Business Plan</i> oleh Pemda Sumut, Riau (Kuala Enok dan Dumai), Kaltim	1 paket	September - Desember 2010		Pemprov Sumut, Pemprov Riau dan Pemprov Kaltim
	Pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat	Kajian pembangunan <i>refinery</i> di Jatim dan bahan baku alternatif dalam dan luar negeri	2 paket	Desember 2010		Pemprov Jatim
		Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan <i>kondensat</i> di Jawa Timur dan Kaltim	2 paket	Desember 2010		Pemprov Jatim, Pemprov Kaltim
		Kajian bahan baku alternatif	1 paket	Desember 2010		
		Penyusunan <i>Business Plan</i>	1 paket	Desember 2010		
		Jumlah peserta pemasnyarakatan kewirausahaan	2.000 orang	Desember 2010		
	Pemasnyarakatan kewirausahaan dan penyediaan dukungan pengembangan wirausaha baru.	Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.	200 unit	Desember 2010	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Kemen KUKM
		Jumlah calon wirausaha baru.	1.000 orang	Desember 2010		Daerah terkait
		Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	350 KUMK	Desember 2010		
		Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator.	10 inkubator	Desember 2010		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar	Peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji (210.000)	Biaya operasional kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi	Desember 2010	Terlaksananya pelaksanaan ibadah haji dengan lebih baik	Kemenag	
		Jumlah kabupaten dan kota yang terpasang Siskohat <i>online</i>	75			Kab/kota terkait
		Jumlah Siskohat yang di <i>upgrade</i>	260			Kab/kota terkait
		Jumlah astrama haji yang direhabilitasi	6		Kemenkes	Kab/kota terkait
		Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	30			Kab/kota terkait
Peningkatan pariwisata	Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan ( <i>sales mission</i> ), dan pendukungan penyelenggaraan festival ( <i>event</i> )	72	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Kemenbudpar	
		Jumlah penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ), dan penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43			
Peningkatan prestasi olah raga Indonesia	Penyiapan atlet andalan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah atlet andalan untuk persiapan Asian Games dan Sea Games serta tersedianya sarana dan prasarana Sea Games	518 atlet	Desember 2010	Meningkatnya prestasi olahraga di kejuaraan internasional	Kemenpora
Peningkatan partisipasi pemuda dalam Gerakan Kependidikan	Pengembangan Gerakan Kependidikan	Tersusunnya kebijakan pengembangan kependidikan	100%	Desember 2010	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam Gerakan Kependidikan	Kemenpora